

NAMA : RESTI APRILIYANI
NPM : 2523031007

UTS STUDI SOSIAL EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN

SOAL No 1

1. Analisis Akar Permasalahan (Pendekatan Multidisipliner: Ekonomi, Sosial, Lingkungan)

Permasalahan penurunan hasil tangkapan ikan di wilayah pesisir menunjukkan adanya krisis yang bersifat sistemik. Pendekatan multidisipliner diperlukan untuk memahami keterkaitan antar faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan secara komprehensif.

Perspektif ekonomi menunjukkan terjadinya eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut yang dikenal sebagai *tragedy of the commons*. Konsep ini menjelaskan bahwa sumber daya bersama cenderung dieksploitasi tanpa batas ketika tidak terdapat pengaturan yang efektif (Hardin, 1968). Nelayan berupaya meningkatkan hasil tangkapan dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan keberlanjutan stok ikan. Ketergantungan tinggi pada sektor perikanan tangkap memperlemah ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Struktur ekonomi yang tidak terdiversifikasi menyebabkan nelayan tidak memiliki alternatif pendapatan ketika hasil tangkapan menurun (Allison & Ellis, 2001). Keterbatasan akses terhadap teknologi modern, informasi pasar, dan modal usaha turut memperburuk produktivitas dan daya saing nelayan.

Perspektif lingkungan memperlihatkan kerusakan ekosistem laut sebagai faktor utama penurunan stok ikan. Praktik *overfishing* mengurangi populasi ikan secara signifikan, sementara penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan merusak habitat penting seperti terumbu karang. Terumbu karang memiliki fungsi sebagai tempat berkembang biak dan berlindung bagi berbagai jenis ikan (Pauly et al., 2002). Dampak perubahan iklim juga semakin nyata melalui peningkatan suhu laut, perubahan arus, serta gangguan terhadap siklus reproduksi ikan (IPCC, 2021). Degradasi ekosistem pesisir seperti mangrove mengurangi fungsi ekologis sebagai *nursery ground*, sehingga mempercepat penurunan populasi ikan dalam jangka panjang.

Perspektif sosial menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Tingkat pendidikan dan literasi lingkungan yang rendah menyebabkan praktik penangkapan destruktif masih berlangsung (Berkes, 2009). Kelembagaan lokal seperti koperasi nelayan belum berfungsi optimal dalam mengatur distribusi sumber daya dan memperkuat posisi tawar nelayan. Ketimpangan sosial dalam akses bantuan dan sumber daya dapat memicu konflik horizontal di antara kelompok nelayan. Fenomena migrasi tenaga kerja ke kota mencerminkan tekanan ekonomi sekaligus menandakan melemahnya struktur sosial di wilayah pesisir (Ellis, 2000).

Keterkaitan antara ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa masalah yang terjadi tidak berdiri sendiri. Eksploitasi ekonomi yang tidak terkendali berdampak langsung pada kerusakan lingkungan, sementara kondisi sosial yang lemah memperparah ketidakmampuan masyarakat dalam beradaptasi. Situasi ini menegaskan bahwa penurunan hasil tangkapan ikan merupakan akibat dari interaksi kompleks antara faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling memengaruhi secara dinamis.

2. Evaluasi Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah daerah yang memberikan subsidi kepada nelayan menunjukkan adanya upaya intervensi untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat pesisir. Pendekatan tersebut cenderung bersifat jangka pendek dan lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan langsung dibandingkan penyelesaian akar masalah. Subsidi mampu meningkatkan daya beli sementara, namun tidak memperbaiki struktur produksi maupun keberlanjutan sumber daya perikanan (Béné et al., 2010).

Efektivitas kebijakan menjadi terbatas karena tidak menyentuh persoalan utama, yaitu overfishing dan kerusakan ekosistem laut. Kebijakan yang tidak diiringi dengan pengawasan ketat terhadap praktik penangkapan ikan menyebabkan eksploitasi sumber daya tetap berlangsung. Lemahnya penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap destruktif menunjukkan adanya kegagalan dalam tata kelola sumber daya perikanan (FAO, 2020). Aspek partisipasi masyarakat juga belum menjadi prioritas dalam kebijakan yang diterapkan. Program subsidi umumnya dirancang secara top-down tanpa melibatkan nelayan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap program, sehingga implementasi di lapangan kurang optimal. Pengelolaan sumber daya berbasis komunitas terbukti lebih efektif ketika masyarakat dilibatkan secara aktif (Ostrom, 1990).

Kebijakan yang ada belum menunjukkan integrasi lintas sektor antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Fokus kebijakan masih terbatas pada aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekologi dan penguatan kapasitas sosial masyarakat. Ketiadaan program diversifikasi ekonomi menyebabkan nelayan tetap bergantung pada aktivitas penangkapan ikan, sehingga rentan terhadap fluktuasi hasil tangkapan (Allison & Ellis, 2001). Kelemahan lain terlihat pada kurangnya penguatan kelembagaan lokal seperti koperasi nelayan. Kelembagaan yang lemah menghambat distribusi bantuan yang merata dan mengurangi efektivitas program pemberdayaan. Kondisi ini memperbesar potensi ketimpangan sosial serta menurunkan daya tahan ekonomi masyarakat pesisir.

Evaluasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa kebijakan subsidi belum efektif karena bersifat reaktif dan parsial. Pendekatan yang digunakan belum mengarah pada pemberdayaan dan keberlanjutan. Kebijakan yang lebih komprehensif, partisipatif, dan terintegrasi diperlukan agar mampu mengatasi permasalahan secara struktural dan jangka panjang.

3. Rancangan Solusi Inovatif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berkelanjutan

Permasalahan di wilayah pesisir membutuhkan solusi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mampu mentransformasi cara masyarakat dalam mengelola sumber daya. Pendekatan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci agar solusi yang dirancang dapat berkelanjutan dan memiliki dampak jangka panjang.

Pengelolaan perikanan berbasis komunitas (*community-based fisheries management*) perlu dijadikan strategi utama. Masyarakat nelayan diberikan kewenangan untuk mengatur zona tangkap, musim penangkapan, serta larangan penggunaan alat tangkap destruktif. Sistem aturan lokal seperti kearifan tradisional dapat dihidupkan kembali untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan kepatuhan dan keberlanjutan sumber daya karena adanya rasa kepemilikan bersama (Berkes, 2009). Diversifikasi ekonomi pesisir menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap perikanan tangkap. Pengembangan budidaya perikanan (*aquaculture*) dapat menjadi

alternatif yang lebih stabil secara ekonomi. Kegiatan ekowisata berbasis masyarakat juga dapat dikembangkan dengan memanfaatkan potensi alam pesisir seperti mangrove dan terumbu karang. Pengolahan hasil laut menjadi produk bernilai tambah seperti ikan asap, abon, atau produk olahan lainnya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat (Allison & Ellis, 2001). Restorasi ekosistem pesisir perlu dilakukan secara terencana dan partisipatif. Rehabilitasi mangrove dan terumbu karang dapat meningkatkan daya dukung lingkungan serta memperbaiki habitat ikan. Ekosistem yang sehat berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas perikanan dalam jangka panjang (Barbier et al., 2011).

Penguatan kelembagaan lokal seperti koperasi nelayan menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pemberdayaan. Koperasi dapat berfungsi sebagai sarana akses terhadap modal, distribusi hasil tangkapan, serta penguatan posisi tawar nelayan di pasar. Kelembagaan yang kuat juga mendukung pengelolaan sumber daya yang lebih terorganisir (Béné et al., 2010). Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas nelayan. Penggunaan aplikasi informasi cuaca, peta potensi ikan, serta platform pemasaran digital membantu nelayan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan memperluas akses pasar. Inovasi ini mampu mengurangi ketidakpastian dalam kegiatan penangkapan ikan.

Penerapan insentif berbasis lingkungan dapat mendorong perubahan perilaku nelayan secara bertahap. Nelayan yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan atau terlibat dalam kegiatan konservasi dapat diberikan insentif ekonomi. Skema ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Rancangan solusi tersebut menekankan pada integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat menjadi fondasi utama agar perubahan yang terjadi tidak bersifat sementara, melainkan mampu menciptakan sistem pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan.

4. Peran Pendidikan IPS dalam Membantu Menyelesaikan Masalah

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memiliki posisi strategis dalam merespons permasalahan pesisir karena karakteristiknya yang integratif dan kontekstual. Pembelajaran IPS mampu menghubungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka pemahaman yang utuh.

Peningkatan literasi ekonomi dan lingkungan menjadi kontribusi utama pendidikan IPS. Peserta didik dibekali pemahaman mengenai pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, konsep kelangkaan, serta dampak eksploitasi berlebihan terhadap kehidupan manusia. Pengetahuan ini penting untuk membentuk kesadaran kolektif masyarakat sejak dini (Banks, 2008). Pengembangan kemampuan berpikir kritis, sistemik, dan reflektif menjadi bagian penting dalam pembelajaran IPS. Siswa diajak menganalisis hubungan sebab-akibat antara aktivitas manusia dan perubahan lingkungan. Kemampuan ini memungkinkan peserta didik memahami bahwa penurunan hasil tangkapan ikan bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan hasil interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Penanaman nilai sosial seperti gotong royong, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan dapat dilakukan melalui pembelajaran IPS. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam membangun pengelolaan sumber daya berbasis komunitas. Kesadaran sosial yang kuat akan mendorong masyarakat untuk bekerja sama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Integrasi prinsip *Education for Sustainable Development* (ESD) dalam IPS memperkuat orientasi pembelajaran menuju keberlanjutan. Pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap dan keterampilan untuk menghadapi

tantangan global seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan (UNESCO, 2017). Peran IPS juga terlihat dalam mendorong pemberdayaan masyarakat. Peserta didik dapat dilibatkan dalam proyek berbasis lingkungan seperti rehabilitasi mangrove, kampanye penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, atau pengembangan ekonomi kreatif pesisir. Keterlibatan langsung tersebut membentuk pengalaman belajar yang kontekstual sekaligus meningkatkan kepedulian sosial. Pendidikan IPS berfungsi sebagai sarana transformasi sosial yang mampu menciptakan generasi yang adaptif, kritis, dan bertanggung jawab. Kontribusi tersebut tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga secara luas dalam upaya mewujudkan pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Allison, E. H., & Ellis, F. (2001). The livelihoods approach and management of small-scale fisheries. *Marine Policy*, 25(5), 377–388.
- Banks, J. A. (2008). *An Introduction to Multicultural Education*. Pearson Education.
- Barbier, E. B., Hacker, S. D., Kennedy, C., Koch, E. W., Stier, A. C., & Silliman, B. R. (2011). The value of estuarine and coastal ecosystem services. *Ecological Monographs*, 81(2), 169–193.
- Béné, C., Hersoug, B., & Allison, E. H. (2010). Not by rent alone: Analysing the pro-poor functions of small-scale fisheries in developing countries. *Development Policy Review*, 28(3), 325–358.
- Berkes, F. (2009). Evolution of co-management: Role of knowledge generation, bridging organizations and social learning. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1692–1702.
- Ellis, F. (2000). *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. Oxford University Press.
- FAO. (2020). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2020*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. *Science*, 162(3859), 1243–1248.
- IPCC. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Cambridge University Press.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Pauly, D., Christensen, V., Guénette, S., Pitcher, T. J., Sumaila, U. R., Walters, C. J., Watson, R., & Zeller, D. (2002). Towards sustainability in world fisheries. *Nature*, 418(6898), 689–695.
- UNESCO. (2017). *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

SOAL No. 2

1. Pandangan tentang Ekonomi di Era Digital

Ekonomi di era digital ditandai oleh transformasi besar dalam cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Digitalisasi memungkinkan terjadinya efisiensi tinggi, penurunan biaya transaksi, serta perluasan akses pasar tanpa batas geografis. Platform digital seperti e-commerce, media sosial, dan *marketplace* menciptakan peluang baru bagi individu untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi, termasuk bagi kelompok yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses, seperti perempuan (Bukht & Heeks, 2017).

Karakter utama ekonomi digital terletak pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Model bisnis berbasis platform memungkinkan individu menjadi produsen sekaligus konsumen (*prosumer*), sehingga struktur ekonomi menjadi lebih inklusif secara potensial. Fleksibilitas waktu dan tempat kerja menjadi keunggulan yang signifikan, terutama bagi perempuan yang sering menghadapi beban ganda antara pekerjaan dan rumah tangga (OECD, 2019). Realitas menunjukkan bahwa ekonomi digital tidak sepenuhnya inklusif. Kesenjangan digital (*digital divide*) masih menjadi tantangan utama, baik dalam akses terhadap teknologi, literasi digital, maupun keterampilan yang dibutuhkan. Ketimpangan ini menyebabkan manfaat ekonomi digital tidak terdistribusi secara merata (UNCTAD, 2021). Perempuan seringkali menghadapi hambatan lebih besar dalam mengakses teknologi dan pelatihan digital dibandingkan laki-laki. Fenomena lain yang muncul adalah terjadinya *platform economy* yang cenderung fleksibel tetapi juga rentan. Pekerjaan digital sering kali bersifat informal dan tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai. Kondisi ini menimbulkan paradoks antara peluang dan kerentanan dalam ekonomi digital (Standing, 2016).

Pandangan terhadap ekonomi digital perlu ditempatkan dalam kerangka kritis. Transformasi digital membuka peluang besar untuk pertumbuhan inklusif, namun tanpa kebijakan yang tepat, justru berpotensi memperlebar ketimpangan sosial dan gender. Pemanfaatan ekonomi digital harus disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar seluruh kelompok masyarakat dapat berpartisipasi secara adil dan optimal.

2. Potensi Kewirausahaan dan Partisipasi Perempuan dalam Dunia Usaha dan Industri

Kewirausahaan perempuan dalam era digital memiliki potensi yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Digital entrepreneurship memberikan ruang bagi perempuan untuk menjalankan usaha secara fleksibel tanpa harus meninggalkan tanggung jawab domestik. Fleksibilitas ini menjadi faktor kunci yang membedakan ekonomi digital dengan ekonomi konvensional (Brush et al., 2018).

Partisipasi perempuan dalam kewirausahaan juga berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan inklusi ekonomi. Perempuan yang memiliki usaha cenderung mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan keluarga seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga berdampak pada pembangunan sosial yang lebih luas (World Bank, 2020). Potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi karena adanya berbagai hambatan struktural. Faktor sosial dan budaya seringkali membatasi ruang gerak perempuan dalam dunia usaha. Norma gender tradisional masih menempatkan perempuan pada ranah domestik, sehingga partisipasi dalam sektor ekonomi menjadi terbatas (Heilman & Chen, 2003). Tingkat pendidikan dan literasi digital yang lebih rendah dibandingkan laki-laki juga menjadi penghambat utama.

Akses terhadap modal dan jaringan bisnis menjadi tantangan lain yang dihadapi perempuan wirausaha. Banyak perempuan mengalami kesulitan dalam mendapatkan

pembiayaan karena keterbatasan aset dan rendahnya kepercayaan dari lembaga keuangan (OECD, 2019). Keterbatasan ini berdampak pada skala usaha yang cenderung kecil dan sulit berkembang.

Potensi kewirausahaan perempuan dalam ekonomi digital tetap sangat menjanjikan. Dukungan teknologi memungkinkan perempuan menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan inovasi produk, serta memperkuat daya saing usaha. Peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3. Peran Pemerintah dalam Mengatasi Ketimpangan Gender di Industri Digital

Ketimpangan gender dalam industri digital menunjukkan adanya kegagalan struktural yang memerlukan intervensi pemerintah secara komprehensif. Peran pemerintah menjadi krusial dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah perlu meningkatkan akses pendidikan dan literasi digital bagi perempuan. Program pelatihan keterampilan digital seperti coding, pemasaran digital, dan manajemen bisnis online harus diperluas secara merata. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah fundamental untuk mengurangi kesenjangan gender (UNESCO, 2017).

Kebijakan afirmatif juga diperlukan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam sektor digital. Insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan perempuan serta dukungan bagi startup yang dipimpin perempuan dapat menjadi strategi efektif. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan kesempatan dalam dunia kerja (OECD, 2019). Pemerintah juga perlu memperluas akses terhadap pembiayaan bagi perempuan wirausaha. Skema kredit mikro, subsidi bunga, serta program inkubasi bisnis dapat membantu perempuan mengembangkan usaha digital mereka. Dukungan finansial yang inklusif akan mempercepat pertumbuhan kewirausahaan perempuan (World Bank, 2020).

Penguatan regulasi terkait perlindungan pekerja digital menjadi aspek penting lainnya. Pekerjaan berbasis platform harus dilengkapi dengan jaminan sosial dan perlindungan hukum agar tidak menimbulkan kerentanan baru, terutama bagi perempuan (Standing, 2016). Upaya lain yang tidak kalah penting adalah perubahan norma sosial melalui kampanye kesetaraan gender. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan media untuk mengubah stereotip yang membatasi peran perempuan dalam sektor teknologi dan industri digital.

Peran pemerintah harus bersifat holistik dan terintegrasi, mencakup aspek pendidikan, ekonomi, sosial, dan regulasi. Kebijakan yang tepat tidak hanya mengurangi ketimpangan gender, tetapi juga meningkatkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Partisipasi perempuan yang lebih besar dalam ekonomi digital akan menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Brush, C. G., de Bruin, A., & Welter, F. (2018). Advancing theory development in venture creation: Signposts for understanding gender. *Entrepreneurship Theory and Practice*.
- Bukht, R., & Heeks, R. (2017). Defining, conceptualising and measuring the digital economy. *Development Informatics Working Paper*.
- Heilman, M. E., & Chen, J. J. (2003). Entrepreneurship as a solution: The allure of self-employment for women and minorities. *Human Resource Management Review*.
- OECD. (2019). *The Future of Work: OECD Employment Outlook*.

Standing, G. (2016). *The Precariat: The New Dangerous Class*. Bloomsbury.

UNCTAD. (2021). *Digital Economy Report*. United Nations.

UNESCO. (2017). *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*.

World Bank. (2020). *Women, Business and the Law*.

SOAL No. 3

Keterkaitan Ekonomi dalam Konteks Pembelajaran IPS

Ekonomi dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu komponen utama yang tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial lainnya seperti budaya, geografi, dan politik. IPS dirancang sebagai bidang studi integratif yang bertujuan memahami fenomena sosial secara holistik. Konsep ekonomi seperti kelangkaan, pilihan, distribusi, produksi, dan konsumsi menjadi dasar dalam menjelaskan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah keterbatasan sumber daya (Banks, 2008).

Keterkaitan ekonomi dalam IPS terlihat dari bagaimana aktivitas ekonomi selalu berhubungan dengan kondisi sosial dan lingkungan masyarakat. Proses produksi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh budaya lokal, kebijakan pemerintah, serta kondisi geografis. Fenomena kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial menjadi contoh nyata yang menunjukkan bahwa masalah ekonomi memiliki dimensi sosial yang luas (Samuelson & Nordhaus, 2010).

Pembelajaran IPS memungkinkan peserta didik memahami bahwa keputusan ekonomi tidak bersifat individual semata, melainkan memiliki dampak kolektif. Pendekatan ini mendorong siswa untuk melihat hubungan sebab-akibat secara sistemik, sehingga terbentuk pemahaman yang kritis terhadap berbagai persoalan ekonomi di masyarakat.

Desain dan Implementasi Pembelajaran Ekonomi dan Kewirausahaan di Sekolah

Pembelajaran ekonomi dan kewirausahaan di sekolah perlu didesain secara kontekstual, aplikatif, dan berorientasi pada pengembangan keterampilan (*skills*) serta pembentukan karakter kewirausahaan. Model pembelajaran yang digunakan tidak cukup hanya bersifat teoritis, melainkan harus memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik.

Pendekatan *project-based learning* (PjBL) menjadi salah satu strategi yang efektif dalam mengembangkan jiwa entrepreneur. Siswa diberikan proyek untuk merancang dan menjalankan usaha sederhana, mulai dari identifikasi peluang, perencanaan produk, produksi, hingga pemasaran. Proses ini melatih keterampilan berpikir kreatif, pengambilan keputusan, serta manajemen risiko (Thomas, 2000).

Integrasi *experiential learning* juga penting dalam pembelajaran kewirausahaan. Siswa belajar melalui pengalaman nyata sehingga konsep ekonomi tidak hanya dipahami secara abstrak, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Kolb, 1984). Kegiatan seperti simulasi bisnis, praktik jual beli, dan kunjungan ke pelaku usaha lokal dapat memperkuat pemahaman siswa.

Penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran menjadi relevan dengan perkembangan ekonomi saat ini. Siswa dapat diajarkan cara memanfaatkan platform digital untuk pemasaran produk, seperti media sosial atau marketplace. Hal ini tidak hanya meningkatkan literasi digital, tetapi juga membuka wawasan tentang peluang ekonomi di era digital (OECD, 2019).

Penilaian pembelajaran seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik. Evaluasi dapat dilakukan melalui portofolio usaha, presentasi bisnis, serta refleksi pengalaman belajar siswa.

Contoh Implementasi di Sekolah

Contoh penerapan pembelajaran kewirausahaan dapat dilakukan melalui proyek "Market Day Sekolah". Siswa dibagi ke dalam kelompok dan diminta untuk membuat produk

sederhana, seperti makanan ringan atau kerajinan tangan. Setiap kelompok merancang strategi produksi, menentukan harga, serta melakukan promosi.

Kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan bazar di lingkungan sekolah. Siswa berperan langsung sebagai penjual dan berinteraksi dengan konsumen. Proses ini melatih keterampilan komunikasi, kreativitas, serta kemampuan mengelola keuangan.

Refleksi dilakukan setelah kegiatan berlangsung. Siswa diminta menganalisis keuntungan, kerugian, serta kendala yang dihadapi selama proses usaha. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengaitkan pengalaman tersebut dengan konsep ekonomi seperti biaya produksi, laba, dan strategi pemasaran.

Daftar Pustaka

Banks, J. A. (2008). *An Introduction to Multicultural Education*. Pearson.

Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Prentice Hall.

OECD. (2019). *The Future of Work: OECD Employment Outlook*.

Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics*. McGraw-Hill.

Thomas, J. W. (2000). *A Review of Research on Project-Based Learning*. Autodesk Foundation.

SOAL No. 4

1. Analisis keterkaitan pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan kesejahteraan

Pertumbuhan penduduk merupakan faktor demografis yang berpengaruh signifikan terhadap dinamika ekonomi dan tingkat kesejahteraan. Perspektif *human capital* menekankan bahwa penduduk tidak hanya dipandang dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas yang mencakup pendidikan, keterampilan, dan kesehatan (Gary Becker, 1993). Kualitas tersebut menentukan sejauh mana penduduk mampu berkontribusi terhadap produktivitas ekonomi. Fenomena bonus demografi di Indonesia menunjukkan dominasi penduduk usia produktif yang seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa struktur usia produktif mendominasi populasi nasional (BPS, 2023). Kondisi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas. Tingginya proporsi pekerja informal menunjukkan bahwa sebagian tenaga kerja belum terserap dalam sektor produktif.

Keterkaitan antara ketiga variabel tersebut bersifat struktural. Pertumbuhan penduduk meningkatkan jumlah angkatan kerja, sementara kapasitas ekonomi menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja. Kesejahteraan hanya dapat tercapai apabila pekerjaan yang tersedia bersifat layak dan produktif. Fenomena *working poor* mengindikasikan bahwa pekerjaan tanpa kualitas yang memadai tidak cukup untuk meningkatkan taraf hidup.

2. Pentingnya keseimbangan pembangunan ekonomi, manusia, dan lingkungan

Pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan antara aspek ekonomi, manusia, dan lingkungan. Paradigma ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekologis (United Nations, 2015). Ketimpangan pembangunan dapat muncul apabila salah satu aspek diabaikan. Pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan akan memperlebar kesenjangan sosial. Eksploitasi sumber daya tanpa kontrol akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak jangka panjang terhadap ekonomi. Pembangunan manusia tanpa dukungan ekonomi yang kuat akan menghadapi keterbatasan pembiayaan. Laporan United Nations Development Programme menunjukkan bahwa negara dengan indeks pembangunan manusia tinggi cenderung memiliki stabilitas ekonomi dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik (UNDP, 2022). Keseimbangan ketiga aspek tersebut menjadi syarat utama terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

3. Mewujudkan SDM unggul melalui pendidikan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia memerlukan integrasi antara sistem pendidikan dan struktur ekonomi. Pendidikan berperan sebagai instrumen utama dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja (Becker, 1993). Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan ketidaksesuaian antara lulusan pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Upaya strategis perlu difokuskan pada penguatan kompetensi. Kurikulum berbasis keterampilan abad ke-21 harus dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan literasi digital. Pendidikan vokasi perlu diperkuat agar selaras dengan kebutuhan industri. Sistem ekonomi juga harus mampu menyediakan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Peran Bappenas menjadi krusial dalam mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan nasional (Bappenas, 2020). Data menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia telah mencapai kategori tinggi, namun tantangan kualitas pendidikan dan produktivitas tenaga kerja masih perlu diatasi (BPS, 2023). Transformasi menuju ekonomi hijau juga menjadi langkah penting dalam menyiapkan SDM yang adaptif terhadap perubahan global.

4. Contoh nyata keberlanjutan ekonomi dan pembangunan manusia di wilayah (Riau)

Implementasi pembangunan berkelanjutan di wilayah Riau dapat dilihat melalui berbagai inisiatif berbasis masyarakat. Pengembangan UMKM lokal berbasis sumber daya daerah seperti kelapa sawit dan perikanan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Tantangan utama masih berkaitan dengan akses teknologi dan pasar.

Program pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja memberikan keterampilan praktis bagi tenaga kerja. Efektivitas program tersebut masih perlu ditingkatkan agar menjangkau lebih banyak masyarakat. Upaya restorasi lahan gambut menunjukkan integrasi antara aspek lingkungan dan ekonomi, terutama dalam mencegah kerugian akibat kebakaran hutan.

Pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku UMKM mulai berkembang dan memberikan peluang peningkatan daya saing. Tingkat literasi digital yang belum merata menjadi kendala yang perlu diatasi. Praktik tersebut mencerminkan upaya menuju pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya tujuan terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif (United Nations, 2015).

Daftar Pustaka

Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis*. University of Chicago Press.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*.

Bappenas. (2020). *Rencana Aksi Nasional SDGs*.

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

United Nations Development Programme. (2022). *Human Development Report*.

SOAL No. 5

1. Analisis tantangan utama UMKM Indonesia dalam menghadapi ekonomi digital dan globalisasi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena menjadi penyerap tenaga kerja terbesar sekaligus penggerak ekonomi lokal. Data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto nasional dan menyerap sebagian besar tenaga kerja domestik (Kemenkop UKM, 2023). Meskipun demikian, transformasi ekonomi digital dan arus globalisasi menimbulkan tantangan baru yang cukup kompleks bagi keberlangsungan UMKM.

Tantangan pertama berkaitan dengan rendahnya literasi digital. Banyak pelaku UMKM masih memandang teknologi hanya sebagai alat komunikasi, bukan sebagai sarana transformasi bisnis. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan platform digital seperti pemasaran daring, pembayaran elektronik, dan analisis konsumen belum optimal. Menurut Bank Indonesia, tingkat adopsi digital UMKM masih belum merata, terutama di wilayah luar kota besar (Bank Indonesia, 2022). Rendahnya literasi digital menyebabkan daya saing UMKM tertinggal dibandingkan pelaku usaha yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi.

Tantangan kedua berhubungan dengan akses pasar global yang terbatas. Globalisasi membuka peluang pasar yang lebih luas, tetapi juga meningkatkan persaingan. Banyak UMKM belum memiliki kemampuan memenuhi standar internasional, baik dari segi kualitas produk, pengemasan, sertifikasi, maupun manajemen distribusi. Hambatan bahasa, logistik, dan minimnya pemahaman tentang ekspor juga menjadi penghalang. Kondisi tersebut membuat sebagian besar UMKM hanya bertahan di pasar lokal tanpa mampu memperluas jangkauan secara internasional.

Tantangan ketiga terletak pada rendahnya inovasi berbasis keberlanjutan. Sebagian besar UMKM masih berfokus pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Padahal, tren pasar global menunjukkan peningkatan preferensi konsumen terhadap produk yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial (United Nations, 2015). Kurangnya pemahaman tentang ekonomi hijau menyebabkan banyak UMKM belum mampu menyesuaikan diri dengan perubahan preferensi pasar modern.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan modal dan akses pembiayaan. Transformasi digital membutuhkan investasi dalam teknologi, pelatihan, dan pengembangan produk. Banyak UMKM menghadapi kesulitan memperoleh pembiayaan formal karena keterbatasan jaminan dan administrasi. Kondisi ini memperlambat proses modernisasi usaha. Secara kritis, tantangan utama UMKM Indonesia bukan hanya persoalan teknologi, melainkan juga persoalan kesiapan sumber daya manusia, budaya bisnis, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan ekonomi global. Transformasi digital tidak dapat berhasil tanpa perubahan pola pikir kewirausahaan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

2. Model pembelajaran IPS berbasis kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan inovasi

Sebagai lulusan S2 Pendidikan IPS, pengembangan model pembelajaran berbasis kewirausahaan dapat dilakukan melalui pendekatan Project-Based Entrepreneurship Learning. Model ini mengintegrasikan pembelajaran IPS dengan pengalaman nyata dalam merancang solusi ekonomi sosial. Tahapan model pembelajaran

- a) Identifikasi masalah sosial-ekonomi
Peserta didik diajak mengamati masalah di lingkungan sekitar seperti pengangguran, limbah rumah tangga, potensi lokal yang belum dimanfaatkan, ketimpangan ekonomi masyarakat. Pada tahap ini peserta didik belajar menganalisis hubungan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Pendekatan ini sesuai dengan karakter pembelajaran IPS yang menekankan pemecahan masalah sosial (John Dewey, 1938).
- b) Eksplorasi peluang usaha
Peserta didik mengembangkan ide bisnis berdasarkan masalah yang ditemukan. Contohnya: limbah plastik menjadi produk kerajinan, hasil pertanian lokal menjadi produk olahan dan digital marketing produk lokal
Tahap ini melatih kreativitas, kemampuan analisis pasar dan keberanian mengambil keputusan peserta didik.
- c) Perancangan bisnis sederhana
Peserta didik menyusun nama usaha, target pasar, strategi promosi digital, estimasi biaya dan nilai sosial produk. Kegiatan ini membantu peserta didik memahami keterkaitan antara teori ekonomi dan praktik kewirausahaan.
- d) Simulasi dan implementasi
Peserta didik melakukan simulasi pemasaran melalui media sosial, marketplace atau presentasi produk. Aktivitas ini meningkatkan komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah dan literasi digital
- e) Refleksi kritis
Peserta didik mengevaluasi manfaat ekonomi, manfaat sosial, dampak lingkungan dan tantangan usaha. Refleksi penting agar kewirausahaan tidak hanya dipahami sebagai mencari keuntungan, tetapi juga sebagai proses perubahan sosial.

3. Integrasi konsep sustainable entrepreneurship dalam model pembelajaran

Konsep *sustainable entrepreneurship* menekankan bahwa kegiatan usaha harus menghasilkan keuntungan ekonomi sekaligus memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan (Dean & McMullen, 2007). Integrasi konsep ini dalam pembelajaran IPS dapat dilakukan melalui tiga dimensi utama.

- a) Dimensi ekonomi
Peserta didik diajarkan bahwa usaha harus memiliki nilai jual, berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan pasar. Peserta didik perlu memahami bahwa keberhasilan bisnis bukan hanya dari penjualan, tetapi juga dari kemampuan mempertahankan usaha dalam jangka panjang.
- b) Dimensi sosial
Pembelajaran mendorong peserta didik menciptakan usaha yang memberdayakan masyarakat lokal, membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi komunitas. Contohnya : produk lokal yang melibatkan ibu rumah tangga atau kelompok pemuda desa dalam proses produksi.

Nilai ini sejalan dengan tujuan pembangunan sosial dalam Sustainable Development Goals (United Nations, 2015).

c) Dimensi lingkungan

Peserta didik diarahkan untuk merancang usaha yang mengurangi limbah, menggunakan bahan ramah lingkungan dan memanfaatkan energi efisien. Contoh: kemasan biodegradable, daur ulang bahan bekas dan produksi minim sampah. Pendekatan ini menanamkan kesadaran ekologis sejak proses pembelajaran.

Integrasi dalam model pembelajaran

Konsep *sustainable entrepreneurship* dapat dimasukkan dalam setiap tahap model:

saat identifikasi masalah → fokus pada masalah lingkungan sosial

saat desain usaha → memilih produk ramah lingkungan

saat pemasaran → menonjolkan nilai sosial produk

saat evaluasi → menilai dampak ekonomi, sosial, lingkungan

Model ini menjadikan pembelajaran IPS lebih kontekstual karena peserta didik tidak hanya memahami teori sosial ekonomi, tetapi juga mampu mengembangkan solusi nyata.

Daftar Pustaka

Bank Indonesia. (2022). *Laporan perkembangan digitalisasi UMKM Indonesia*.

Dean, T. J., & McMullen, J. S. (2007). Toward a theory of sustainable entrepreneurship. *Journal of Business Venturing*, 22(1), 50–76.

Dewey, J. (1938). *Experience and education*. New York: Macmillan.

Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Perkembangan data UMKM Indonesia*.

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*.